

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang menerapkan adanya desentralisasi daerah sejak tahun 2001. Hal tersebut tertuang dalam undang-undang Republik Indonesia (UU) Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hak otonomi tersebut menjadikan pemerintah daerah berhak untuk melakukan pembangunan daerah sendiri merupakan suatu proses pemerintah dan masyarakatnya untuk mengelola sumber daya yang ada dengan tujuan untuk menyejahterakan kehidupan masyarakatnya dan hal ini juga merupakan strategi yang sangat bagus agar pelaksanaan pembangunan nasional dapat dilakukan secara merata dan menghindari adanya ketertinggalan pembangunan pada wilayahwilayah tertentu. Hal ini, menyebabkan banyak orang yang beranggapan bahwa dengan adanya desentralisasi daerah, maka akan tercipta *good local governance*, sebab dalam pelaksanaannya akan melibatkan stakeholder dan orientasinya akan lebih jelas untuk kesejahteraan masyarakat, baik dalam hal ekonomi, sosial dan lain sebagainya.

Definisi RTH sendiri dalam pasal 1 UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang adalah area memanjang/ jalur dan/ atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.¹Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (*open spaces*) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman dan vegetasi (endemik maupun introduksi) guna mendukung manfaat ekologis, sosial-budaya dan arsitektural yang dapat memberikan manfaat ekonomi (kesejahteraan) bagi masyarakatnya.

Secara aritmetik kebutuhan luas lahan minimum untuk RTH di perkotaan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Penataan Ruang (UUPR) Nomor 26 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/Prt/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan sebesar 30 %. Dengan pembagian 20% untuk ketersediaan ruang terbuka hijau public dan 10% untuk ketersediaan ruang terbuka hijau privat.

Penyediaan RTH di kawasan perkotaan dimaksudkan agar terciptanya lingkungan perkotaan yang berkelanjutan. Hal ini diperlukan untuk mencegah adanya pemanasan global (*global warming*), bencana lingkungan seperti banjir, dan degradasi kualitas lingkungan. Untuk itu, RTH memiliki peranan yang sangat penting bagi sebuah wilayah, sebab tanpa diimbangi proses penghijauan,

¹ Prihandono, Aris. "Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) menurut UU No. 26/2007 tentang penataan ruang dan fenomena kebijakan penyediaan RTH di daerah." *Jurnal Permukiman* 5.1 (2010): 13-23.

maka tidak akan ada udara sejuk dan bersih, yang ada hanyalah polusi yang disebabkan oleh udara yang diakibatkan oleh padatnya aktivitas yang terjadi di suatu wilayah.

Wilayah kota sendiri adalah suatu daerah atau kawasan yang menjadi pusat kegiatan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan juga merupakan pusat peradaban. Manusia memiliki tiga kebutuhan hidup yang sangat penting. Tiga hal tersebut adalah pakaian (sandang), makan (pangan), dan tempat tinggal (papan). Tetapi, dengan berjalannya waktu, kebutuhan manusia menjadi semakin kompleks. Hal inilah yang menyebabkan adanya perkembangan zaman dan masif-nya pembangunan guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu bentuk nyata dari dampak pemenuhan kebutuhan manusia tersebut yakni menyempitnya lahan atau ruang hijau di kawasan perkotaan.

Kebutuhan akan pasokan udara bersih bagi masyarakat perkotaan juga merupakan hal yang sangat fundamental. Hal ini akan dapat diatasi dengan perhatian lebih pada aspek kelestarian lingkungan yang diwujudkan melalui pembangunan kota yang ramah akan lingkungan. Dalam mengimplementasikan suatu kelestarian lingkungan, pemerintah dapat mewujudkannya melalui pembangunan RTH. Di mana kawasan RTH ini bukan hanya dapat dijadikan tempat untuk rekreasi atau relaksasi, tetapi juga sebagai paru-paru kota yang dapat menyediakan udara bersih, menahan perkembangan lahan terbangun untuk masyarakat kota, dan untuk mengurangi polusi udara.

Aspek pembangunan RTH pun yang seharusnya menjadi salah satu perhatian utama oleh pemerintah, namun pada realitanya masih terbengkalai oleh kepentingan yang lain seperti halnya pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Untuk itu, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementrian Pekerjaan Umum pun memberikan himbauan kepada seluruh pemerintah daerah agar menyediakan 30% dari jumlah seluruh luas kawasan kota harus dijadikan ruang terbuka hijau. Pembangunan RTH pun juga harus memperhatikan pemenuhan aspek-aspek yang telah diatur seperti halnya yakni fisik ekologis (pemenuhan atau kekayaan berbagai jenis plasma nutfah-nya), nilai ekonomis (nilai penyeimbang untuk kesehatan lingkungan dan nilai produktif finansial), serta pemenuhan fungsi sosial budaya (pendidikan, nilai budaya dan psikologisnya).

Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan perkotaan merupakan penyeimbang antara perkembangan dan pertumbuhan suatu kawasan yang sangat pesat. Suatu kawasan yang memiliki pertumbuhan yang pesat juga memberikan dampak negatif bagi suatu perkotaan. Seperti halnya beban kota menjadi meningkat, populasi penduduk meningkat, kualitas lingkungan kota menjadi turun serta jumlah ruang terbuka hijau publik juga semakin berkurang. Hal ini lah yang menyebabkan tidak seimbangnya suatu pola penggunaan lahan secara ekologis.²

Kabupaten Bungo adalah salah satu kabupaten dalam Provinsi Jambi. Pertumbuhan ekonomi kabupaten Bungo selama periode tahun 2000-2010 yang

² Budiman A., Sulistyantara B. dan Zain A. F., "Deteksi Perubahan Ruang Terbuka Hijau pada 5 Kota Besar di Pulau Jawa (Studi Kasus: DKI Jakarta, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Jogjakarta, dan Kota Surabaya)," Jurnal Lanskap Indonesia 6, no. 1 (2014): 7,

rata rata lebih dari 6 persen pertahun. Tidak hanya pertumbuhan ekonomi yang meningkat, indek pembangunan manusia di kabupaten ini juga mengalami peningkatan meskipun peningkatannya lebih kecil jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonominya. Khususnya pertumbuhan Pembangunan di Jantung Kota, ini terbukti dengan mulai terpenuhinya pelayanan publik yang ada di wilayah kota. Untuk itu secara otomatis, di wilayah perencanaan pembangunan RTH akan terganggu karena pertumbuhan pemukiman yang tinggi.

Salah satu dampak dari pertumbuhan penduduk serta Pembangunan di Kabupaten Bungo ini merupakan semakin tinggi juga kebutuhan akan lahan untuk dijadikan pemukiman. Dari sini proses untuk pemenuhan proporsi untuk ruang terbuka hijau pun semakin berat dan semakin sempit pula ruang terbuka hijau serta akan terjadi pula penurunan daya dukung lingkungan. Dalam hal ini yang harusnya jadi fokus pemerintah merupakan Ruang Terbuka Hijau yang ada di jantung kota yang pertumbuhan nya sudah mulai meingkat, karena itu Ruang terbuka hijau pertamanan kota menjadi salah satu elemen penting dalam meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan

Dalam Hal ini yang bertanggung jawab atas Ruang Terbuka Hijau di taman yang ada di kota Bungo adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Menurut Permendagri No.1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau perkotaan bertujuan untuk :

- a. Menjaga Keserasian dan Keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan

- b. mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan
- c. meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

Dari beberapa RTH yang ada kabupaten Muara Bungo, RTH yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi fokus penelitian penulis. Permasalahan pada RTH yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman antara lain seperti masalah sampah, fasilitas yang terkesan tidak terawat, dan juga masih banyak keluhan Masyarakat lainnya, oleh karena itu Pemerintah/Dinas terkait harus menangani permasalahan yang ada. Inilah permasalahan publik yang menuntut pemerintah/dinas terkait untuk menemukan Solusi dan menyelesaikan permasalahan tersebut.

Muara Bungo merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Jambi, Kabupaten Bungo juga merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki penduduk yang banyak yang memiliki penduduk berjumlah sekitar 382.311 penduduk pada tahun 2020³

Dalam hal ini Ketersediaan RTH merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas lingkungan di perkotaan, hal tersebut menjadi masalah yang terjadi di Kota Bungo karena banyaknya penduduk kualitas lingkungan perkotaan jadi menurun jika RTH dikawasan perkotaan tidak seimbang dengan pertumbuhan suatu Kawasan, oleh karena itu Ruang Terbuka Hijau untuk publik

³ <https://jambi.bps.go.id/indicator/12/32/1/penduduk-provinsi-jambi.html>

harus seimbang dengan pertumbuhan di Kawasan tersebut untuk menyeimbangkan pola penggunaan lahan secara ekologis.

Kabupaten Bungo memiliki beberapa Taman Kota lain seperti yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Bungo, Taman-taman di Bungo adalah sebagai berikut :

Taman-Taman yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bungo

No	Nama Taman	Alamat	Dinas yang mengelola
1.	Taman Kota Lintas Muara Bungo	Jl. Lintas Sumatra KM 01, Kelurahan Bungo Barat, Kecamatan Pasar Muara Bungo	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bungo
2.	Taman Pusparagam Muara Bungo	Kelurahan Bungo Timur, Kecamatan Pasar Muara Bungo	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo
3.	Taman Hijau Muara Bungo	Kelurahan Bungo Barat Kecamatan Pasar Muara Bungo	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo
4.	Taman Tampoenak Muara Bungo	Kelurahan Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo

Sumber : Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo, 2018

Ada tiga taman yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berada di kota Bungo, dan taman-taman ini merupakan RTH yang ada di kota Bungo, dalam hal ini peneliti ingin mengetahui apa peran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam pengelolaan taman-taman yang

dikelolanya dikarenakan diantara taman taman yang dikelola oleh Dinas tersebut masih terdapat masalah masalah yang perlu di Atasi oleh Dinas terkait. Seperti yang disebutkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bungo dalam Pasal 13 ayat (2) dan juga dalam Pasal 14 ayat(1) yang menyebutkan bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengelola taman di kabupaten muara Bungo.

Ruang Terbuka Hijau (Taman) yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo ada beberapa dan yang menjadi fokus peneliti disini merupakan Taman yang ada di kota Bungo karena kepadatan penduduk yang ada di kota Bungo, oleh karenanya ada Tiga Taman yang akan jadi fokus peneliti, yaitu ada Taman Pusparagam, Taman Hijau, dan Taman Tampoenek Muaro Bungo.

Berdasarkan pengamatan peneliti, peran pemerintah masih kurang dalam pengelolaan taman, seperti taman pusparagam, fasilitas dan kebersihannya masih kurang terjaga. Begitu juga dengan Taman Hijau kota digadang-gadang akan menjadi Kawasan hijau ditengah kota juga tidak mendapatkan perhatian pemerintah, hamper semua fasilitas seperti jalan, lampu, tempat duduk dan lainnya rusak. Tidak berbeda dengan kondisi Taman Tampoenek, piajakan yang terbuat dari kayu lepas sehingga bisa membahayakan para pengunjung dan toiletnya pun tidak terawatt.

Dari penjelasan diatas penulis menemukan bebereapa masalah atau fenomena yang ditemukan diantaranya :

1.) Belum adanya perencanaan pengelolaan lingkungan yang terencana untuk mewujudkan taman kota yang baik. Fasilitas taman kota banyak yang rusak dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya.

2.) Ketiga taman yang ada di kabupaten Muaro Bungo kurang terawat

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa penulis yang sejalan dengan penelitian ini. Penelitian Pertama, yang dilakukan oleh Jihan Novita Sari dan Sudirman L, dengan judul *“Peran Pemerintah Kota Parepare dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau”*. Penelitian ini membahas tentang peran Pemerintah Kota Parepare dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Parepare. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui upaya Pemerintah Daerah dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Parepare berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau serta untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pemerintah dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Parepare. Hasil dari penelitian ini adalah peran Pemerintah Daerah dalam pengelolaan ruang terbuka hijau oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare pada umumnya sudah berjalan dengan baik ditinjau dari beberapa tempat dan mekanisme pengelolaan ruang terbuka hijau. Namun masih ditemukan beberapa kendala yang dihadapi pemerintah seperti kurangnya kesadaran masyarakat sehingga terjadi pengrusakan fasilitas penunjang ruang terbuka hijau yang telah disediakan oleh pemerintah. Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare telah menjalankan peran dan melaksanakan kebijakan terkait ruang terbuka hijau mulai pada aspek pemeliharaan, penataan kepada petugas taman hingga

memberikan sosialisasi kepada masyarakat, namun masih belum berjalan optimal⁴

Penelitian kedua, yang dilakukan oleh Ary Kenan Paranoan, Murshal Manaf, dan Syafri Syafri dengan judul “*Peranan Pemerintah dalam Pengelolaan Berkelanjutan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar*”. Taman Maccini Sombala yang terletak di wilayah kota Makassar diresmikan pada tahun 2014 pada awalnya merupakan taman yang indah dan banyak diakses oleh masyarakat untuk berbagai aktivitas. Dalam periode yang tidak terlalu lama kondisi taman ini berangsur-angsur tidak terawat dan terbengkalai, berbagai fasilitas dan bangunan tidak lagi berfungsi. Kondisi disebabkan salah satunya oleh peranan pemerintah yang belum optimal dalam mengelola Taman Maccini Sombala. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara dengan beberapa informan kunci dengan berfokus pada kesiapan dan komitmen pemerintah dengan melihat beberapa hal yaitu strategi dan kebijakan, kemitraan dan kerjasama, serta mobilisasi sumber daya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Taman Maccini Sombala belummiliki strategi dan kebijakan pengelolaan yang baik, belum adanya kerjasama dengan pihak swasta maupun masyarakat serta mobilisasi sumberdaya manusia maupun finansial yang belum memadai. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain kepemilikan aset yang tumpang

⁴ Sari, Jihan Novita, and L. Sudirman. "PERAN PEMERINTAH KOTA PAREPARE DALAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HUJAU." *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara* 1.2 (2023): 77-87.

tindih, alokasi dana dan sumberdaya manusia yang kurang memadai dan kebijakan yang tidak berjalan kontinyu karena adanya pergantian pejabat.⁵

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Dinda Faras Khairunisa, Hajizah Masyuni Adrelia, Dandy Alamsyah, Syanian Amanda Handesty, dengan judul *“Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pontianak”*. Ketentuan terkait penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH), sebagaimana yang tertulis pada Pasal 29 Ayat 2 UUD Penataan Ruang No 26 Th 2007, menegaskan kewajiban menyediakan keberadaan ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas wilayah perkotaannya. Namun, pada periode 2017-2021, penyediaan dan pemanfaatan RTH di Kota Pontianak hanya mencapai 18% dari target 30% yang ditetapkan oleh undang-undang. Maka dari itu, dilakukanlah penelitian ini yang bertujuan untuk mengidentifikasi peran BAPPEDA dalam mengelola RTH di Kota Pontianak dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh BAPPEDA dalam pengelolaan RTH. Metode penelitian studi pustaka digunakan dalam penulisan artikel ini, yang melibatkan kumpulan data serta memahami dan mempelajari berbagai teori dan literature yang terkait. Data dikumpulkan melalui pencarian dan pengumpulan sumber dari berbagai referensi seperti buku, jurnal, dan penelitian sebelumnya. Berbagai kumpulan kajian pustaka dari sejumlah referensi dianalisis secara teliti dan kritis untuk mendukung masukan dan gagasan, dengan tujuan untuk memahami peran BAPPEDA dalam

⁵ Paranoan, Ary Kenan, Murshal Manaf, and Syafri Syafri. "Peranan Pemerintah dalam Pengelolaan Berkelanjutan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar: Studi Kasus Taman Maccini Sombala." *Urban and Regional Studies Journal* 5.2 (2023): 102-105.

mengelola RTH di Kota Pontianak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja BAPPEDA dalam pengelolaan RTH di Kota Pontianak cukup positif, tercermin dari peningkatan persentase ketersediaan RTH di kota tersebut.⁶

Dari beberapa temuan diatas serta rasa penasaran dan ingin tahu dari penulis atas permasalahan tersebut, maka dilakukanlah penelitian dengan judul **“Peran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo dalam Pengelolaan Taman Kota Muaro Bungo”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka fokus penelitian akan ditujukan pada :

1. Bagaimana Peran dan Upaya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo dalam Pengelolaan taman Kota Muara Bungo
2. Apa Kendala atau Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo dalam pengelolaan Taman Kota Muara Bungo

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat ditetapkan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Peran dan Upaya Pemerintah Kabupaten Bungo dalam pengelolaan Taman kota Muara Bungo

⁶ Khairunisa, Dinda Faras, et al. "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pontianak." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7.3 (2023): 27725-27730.

2. Untuk mengetahui kendala dan hambatan apa yang dihadapi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo dalam pengelolaan taman kota Muara Bungo

1.4. Kegunaan Penelitian

Dalam setiap penelitian ada tujuan yang ingin dicapai oleh penulis, sehingga penelitian yang dilakukan dapat berguna dan bermanfaat baik untuk menulis, kalangan akademika, aparatur pemerintah, maupun Masyarakat secara umum. Adapun kegunaan penelitian yang ingin dicapai penulis adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Dari penelitian ini penulis mengharapkan dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat tentang Peran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo dalam Pengelolaan Wisata taman Pusparagam Muara bungo, sehingga menambah pengetahuan dan informasi terutama dalam kajian bidang Ilmu Pemerintahan.

2. Kegunaan Praktis

Dari penelitian ini, diharapkan penulis dapat memberikan kontribusi berupa masukan yang bermanfaat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan pengetahuan tambahan mengenai Peran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo dalam Pengelolaan Wisata Taman Pusparagam muaro Bungo, Sedangkan bagi pemerintah dapat dijadikan masukan untuk meningkatkan dalam peran Pemerintah dalam pengelolaan

1.5. Landasan Teori

Teori menjadi landasan bagi peneliti dalam menganalisis permasalahan yang teridentifikasi di lokasi penelitian. Di bawah ini adalah teori yang digunakan oleh peneliti untuk mengatasi permasalahan yang ada di lapangan :

1.5.1. Pengertian Peran

Menurut Soerjono Soekanto (2002:243) peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawahannya mempunyai peranan yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi didalam status sosial.⁷

⁷ Riauni, Margaretha. "Peran Dinas Tenaga Kerja Dalam Penempatan Tenaga Kerja Lokal Di Kota Pekanbaru Tahun 2012-2013." *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 1.2 (2014): 1-15.

1.5.2. Peran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Walikota/Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan Permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.⁸ Seperti yang disebutkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bungo No.38 tahun 2017 dalam Pasal 13 ayat (2) dan juga dalam Pasal 14 ayat(1) yang menyebutkan bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menjalankan tugas dan fungsinya⁹

Dalam hal ini peneliti menggunakan teori yang sejalan dengan tujuan skripsi ini dengan menggunakan teori dari Henry Fayol yang menyatakan bahwa pengertian manajemen adalah proses yang terdiri dari kegiatan untuk merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan sumber daya manusia (SDM) & mengendalikan pengendalian dalam rangka untuk mencapai tujuan yang akan dicapainya.

1.5.3. Teori Manajemen Henry Fayol

Menurut Henry Fayol fungsi manajemen terdiri atas Perencanaan (*planning*), Pengorganisasian (*Organization*), Pengarahan (*Commanding*), Pengkoordinasian (*Coordinating*), Pengendalian (*Controlling*). Adapun penjelasan dari fungsi fungsi ini adalah sebagai berikut:

⁸ disperkim.semarangkota.go.id pertama kali diindeks oleh Google pada Agustus 2018 ⁹ Perbup Bungo No 38 tahun 2017

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan (*planning*) adalah fungsi dasar (*fundamental*) dari manajemen, ini dikarenakan fungsi manajemen pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengendalian harus dilakukan perencanaan terlebih dahulu. Proses perencanaan sifatnya sangat dinamis, artinya dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat itu. Proses perencanaan ditujukan untuk masa yang akan datang karena pada masa yang akan datang penuh dengan ketidakpastian.

Untuk lebih memahami lagi mengenai perencanaan, maka Henry Fayol memberi pernyataan mengenai hal tersebut. Perencanaan berupa penentuan langkah awal yang memungkinkan suatu organisasi dapat mencapai tujuannya dan juga berhubungan dengan usaha yang dijalankan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa-masa yang akan datang dan penentuan sebuah strategi/ taktik yang tepat dalam rangka untuk mewujudkan tujuan pada suatu organisasi.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Henry Fayol menyatakan teori tentang pengorganisasian tentang organisasi lini, yaitu adanya pemusatan wewenang pada level pimpinan organisasi, oleh karenanya berbagai fungsi akan tersentralisasi pada tangan pimpinan tertentu sebab dengan tegas memisahkan bidang kegiatan

pimpinan (manajerial sebagai pusat wewenang) dan bidang kegiatan teknis (nonmanajerial). Prinsip-prinsip pengorganisasian menurut Henry Fayol adalah adanya pembagian tugas pekerjaan, kesatuan pengarahan, sentralisasi, mata rantai tingkat jenjang organisasi.

c. Pengarahan (*Commanding*)

Fungsi Manajemen Menurut Henry Fayol pada proses pengarahan adalah ditujukan untuk memberikan arahan kepada Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pegawai pada suatu organisasi/ perusahaan supaya pegawai yang bersangkutan dapat menyelesaikan tugasnya secara baik.

d. Pengkoordinasian (*Coordinating*)

Pernyataan Henry Fayol mengenai koordinasi yaitu bahwa mengkoordinasi dapat berarti mengikat bersama menyatukan dan menyelaraskan seluruh kegiatan yang ada dalam rangka untuk mencapai tujuan suatu organisasi.

e. Pengendalian (*Controlling*)

Fungsi manajemen menurut Henry Fayol ini adalah merupakan aktivitas untuk memantau, membuktika dan memastikan bahwa semua kegiatan yang telah melewati tahapan pada fungsi manajemen sebelumnya berjalan seseuai dengan target dan juga sesuai dengan standar dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi. Pada fungsi controlling ini bermanfaat untuk memastikan bahwa kegiatan yang telah dilakukan sesuai

dengan rencana awal dan untuk mengevaluasinya serta untuk memberi pemecahan masalah yang betul (solusi) terhadap penyimpangan yang sifatnya signifikan (berarti).⁹ Sebagai Dinas yang bertanggung jawab atas pengelolaan ruang terbuka hijau kota (Taman), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki potensi yang sindergis dari kelima fungsi tersebut yang digunakan oleh Henry Fayol untuk pengelolaan ruang terbuka hijau kota (Taman), karena selaras dengan fungsi dari manajemen. Oleh karena itu dengan menggunakan Teori Henry Fayol peneliti dapat mengetahui Peran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota dengan menggunakan teori Henry Fayol yang memiliki beberapa fungsi, peneliti dapat mengetahui tujuan dari skripsi ini.

⁹ <https://ekonomi.bunghatta.ac.id/index.php/id/artikel/1364-mengenal-fungsi-manajemenmenurut-henryfayol>

1.6. Kerangka Berpikir

PERAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN BUNGO
DALAM PENGELOLAAN TAMAN
KOTA MUARA BUNGO



Permasalahan :

1. Tidak adanya pengelolaan lingkungan yang terencana
2. Kurang terawatnya Taman , dimana tujuan dari Pengelolaan disini yaitu untuk meningkatkan kualitas lingkungan prkotaan yang sehat,bersih,indah, dan nyaman.



Analisis menggunakan teori Henry Fayol

1. Perencanaan (*planning*)
2. Pengorganisasian (*Organization*)
3. Pengarahan (*Commanding*)
4. Pengkoordinasian (*Coordinating*),
5. Pengendalian (*Controlling*).



Hasil yang diharapkan :

Terselenggaranya Peran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Pengelolaan Taman Kota.

1.7. Metode Penelitian

Untuk mengaplikasikan suatu teori dalam menangani suatu permasalahan, diperlukan pendekatan khusus yang dianggap relevan dan efektif dalam memecahkan masalah tersebut. Metode penelitian diartikan sebagai pendekatan ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan manfaat tertentu.¹⁰ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang memiliki tujuan untuk menggambarkan suatu situasi atau kejadian. Pendekatan kualitatif yang diterapkan adalah deskriptif kualitatif. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk menyajikan data sekomprehensif mungkin mengenai manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya dengan tingkat ketelitian yang optimal.¹¹ Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan secara holistik untuk mencapai kesempurnaan dalam menggambarkan fenomena yang diteliti.

1.7.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang memperhatikan dan mengungkapkan suatu keadaan atau objek dalam konteksnya, dengan tujuan menemukan makna atau pemahaman yang mendalam tentang suatu masalah tertentu. Dalam penelitian kualitatif, upaya untuk memahami makna suatu kejadian atau peristiwa dilakukan dengan berinteraksi

¹⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 13

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1981, hlm. 10.

langsung dengan orang-orang yang terlibat dalam situasi atau fenomena tersebut.¹² Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan riset yang menitikberatkan pada pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, serta deskripsi mendalam terkait suatu fenomena. Pendekatan ini lebih menekankan pada kualitas daripada kuantitas, dan menggunakan berbagai cara untuk mengumpulkan data yang kemudian disajikan secara naratif.¹⁴

1.7.2. Lokasi Penelitian

Tempat yang dijadikan peneliti untuk meneliti yaitu bertempat di Taman Kota Kabupaten Bungo. Peneliti ingin terjun langsung ke lapangan untuk mencari jawaban dari pihak – pihak yang terkait.

1.7.3. Fokus Penelitian

Dalam mempertajam penelitian, peneliti kualitatif menetapkan fokus. Spradley menyatakan bahwa “*A focus refer to a single cultural domain or a few related domains*” maksudnya adalah, focus ini merupakan fenomena/domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi social. Dalam penelitian kualitatif, penentuan focus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan)¹³ Penentuan fokus penelitian didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang dapat diperoleh dari

¹² Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan, Jakarta: Kencana, 2014, Hlm. 328. ¹⁴ Ibid, Hlm. 329

¹³ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : ALFABETA, CV, 2020), hal 57.

situasi sosial di lapangan. Setelah melakukan penjelajahan umum, peneliti memperoleh gambaran umum yang masih pada tahap permukaan terhadap situasi sosial. Untuk memahami secara lebih luas dan mendalam, diperlukan pemilihan fokus penelitian yang berhubungan dengan peran.

1.7.4. Sumber Data

Sumber data merujuk pada segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Peneliti kualitatif umumnya memilih untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber. Dalam penelitian ini, data dapat diperoleh dari dua jenis sumber utama:

a. Data sekunder

Sumber ini tidak memberikan data secara langsung kepada proses pengumpulan data. Data sekunder diperoleh dari berbagai bahan kepustakaan, seperti jurnal, buku, internet, dan sebagainya, yang diperlukan dalam penelitian.

Data sekunder yang saya gunakan disini merupakan Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti saat mengunjungi Lokasi Penelitian.

b. Data Primer

Data primer merupakan informasi verbal, kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerakan, atau perilaku yang dapat dipercaya. Data primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui sumber pertama, yakni responden atau informan, melalui wawancara, atau pengamatan yang dilakukan oleh peneliti sendiri.

Data Primer yang didapatkan melalui wawancara secara langsung dengan individu yang terlibat dengan Pengelolaan Taman Kota Kabupaten Muara Bungo.

1.7.5. Teknik Penentuan Informan

Teknik Penentuan Informan adalah metode yang digunakan oleh peneliti kualitatif untuk menentukan siapa yang akan dijadikan sumber data atau informan. Karena penelitian kualitatif tidak mengenal sampel (cuplikan), penentuan informan dilakukan berdasarkan keterlibatan atau keterkaitan informan dengan objek penelitian yang akan diteliti. Peneliti menentukan jumlah informan yang akan dimintai informasinya berdasarkan keterlibatan dengan objek penelitian.¹⁴

Namun, ada peluang bagi peneliti untuk menggunakan teknik snowball, yang memungkinkan jumlah informan bertambah sesuai keperluan penelitian. Pertimbangan di sini adalah orang-orang yang memiliki kriteria tertentu dan dianggap memiliki pengetahuan yang paling dalam mengenai topik penelitian. Pemilihan informan untuk studi ini berdasarkan pada kemampuan orang-orang tersebut dalam memberikan informasi yang komprehensif dan relevan terkait dengan penelitian, sehingga data yang diperoleh dapat dianggap valid dalam meneliti *“Peran*

¹⁴ Pahrudin, Makmum Wahid, Rio Yusri Maulana, Sustri Desti Elsi, Moh, Arif Rakhman., *Pedoman Penulisan Proposal Dan Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.*, 2021, Hlm. 15

Dinas Perumahan dan Kawasan Taman Kota Muaro Bungo” Berikut beberapa informan yang diantaranya :

1. Kepala Bidang Permukiman dan Sarana Utilitas (Dinas Perkim)
2. Penata Ruang Muda (Dinas Perkim)
3. Kepala Bidang Kebersihan (DLH)
4. Pengunjung Taman

1.7.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan Langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹⁵

a. Wawancara

Wawancara atau Interview adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara (*Interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*Interviewee*) melalui komunikasi langsung. Dapat juga diartikan sebagai percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi. Pewawancara mengajukan pertanyaan secara langsung mengenai objek penelitian yang telah dirancang. Terdapat tiga jenis

¹⁵ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : ALFABETA, CV, 2020), hal 104.

wawancara, yaitu terencana terstruktur, terencana tidak terstruktur, dan wawancara bebas.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menggunakan wawancara terencana terstruktur. Dalam jenis wawancara ini, pewawancara (penulis) menyusun rencana atau pedoman pertanyaan secara terperinci dan sistematis dengan menggunakan format baku. Selain itu, penulis juga menerapkan wawancara terencana-tidak terstruktur, di mana pewawancara menyusun jadwal wawancara yang mantap tetapi tidak membatasi penggunaan format atau urutan pertanyaan yang baku.¹⁶

Tabel 1.1

Daftar Narasumber yang Diwawancara

No.	Narasumber	Jumlah
1.	Kepala Bidang Permukiman dan Sarana Utilitas (Dinas Perkim)	1 Orang
2.	Penata Ruang Muda (Dinas Perkim)	1 Orang
3.	Kepala Bidang Kebersihan (DLH)	1 Orang
4.	Pengunjung Taman	2 Orang
Jumlah		5 Orang

¹⁶ Muri Yusuf, Op.Cit., Hlm., 368

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Keberhasilan observasi sangat bergantung pada keterampilan dan ketelitian pengamat, karena pengamat harus melihat, mendengar, mencium, atau mendengarkan satu objek penelitian, dan kemudian menyimpulkan dari apa yang diamati tersebut. Dengan demikian, pengamat memiliki peran kunci dalam menentukan keberhasilan dan ketepatan hasil penelitian menggunakan teknik observasi.¹⁷Observasi yang dilakukan oleh peneliti merupakan observasi terhadap lokasi penelitian yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu Taman Tampoenek, Taman Pusparagam, Taman Hijau.

c. Dokumentasi

Dokumentasi atau dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen mengenai individu atau kelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen dapat berbentuk teks tertulis, artefak, gambar, atau foto. Dokumen tertulis juga bisa berupa sejarah kehidupan (*life histories*), biografi, karya tulis, dan cerita. Selain itu, material budaya atau hasil

¹⁷ Ibid, Hlm., 377

karya seni juga dapat menjadi sumber informasi yang berharga dalam konteks penelitian kualitatif.¹⁸ Dokumen yang didapatkan peneliti berupa foto lokasi dan keadaan taman.

1.7.7. Teknik Analisis Data

Bogdan dan Biklen menjelaskan bahwa analisis data merupakan suatu proses sistematis dalam pencarian dan pengaturan transkrip wawancara, observasi, catatan lapangan, dokumen, foto, dan materi lainnya. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data yang telah dikumpulkan. Dengan demikian, analisis data memungkinkan temuan penelitian untuk disajikan dan diinformasikan kepada orang lain secara lebih terstruktur dan jelas.¹⁹ Peneliti menggunakan teknis analisis data lapangan dengan model Miles dan Huberman. Data penelitian kualitatif dikumpulkan melalui berbagai teknik pengumpulan data, dan oleh karena itu, data tersebut harus diproses dan dianalisis sebelum dapat digunakan. Miles dan Huberman mengusulkan tiga model analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Reduksi data melibatkan pemilihan data atau informasi yang relevan dengan topik penelitian. Penyajian data melibatkan penampilan atau pemetaan data yang diperoleh selama proses pengumpulan data. Terakhir, verifikasi atau penarikan

¹⁸ Ibid, Hlm., 391

¹⁹ Ibid, Hlm., 401

kesimpulan merupakan tahap analisis data atau informasi yang mengarah pada kesimpulan penelitian.²⁰

1.7.8. Keabsahan Data

Penelitian kualitatif memiliki kelemahan, terutama terkait dengan subjektivitas peneliti yang dominan dalam pendekatan ini. Alat penelitian utama, seperti wawancara dan observasi, memiliki kelemahan, terutama jika dilakukan tanpa kontrol dan dengan sumber data kualitatif yang kurang kredibel, hal ini dapat memengaruhi akurasi hasil penelitian. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan mekanisme triangulasi, yang merupakan kombinasi berbagai sumber data, tenaga peneliti, teori, dan teknik metodologis dalam suatu penelitian atau fenomena sosial. Triangulasi menjadi penting karena setiap teknik memiliki keunggulan dan kelemahan sendiri. Dengan demikian, triangulasi memungkinkan tangkapan realistis yang lebih valid dalam penelitian kualitatif.²¹ Penelitian ini menerapkan triangulasi data, yang melibatkan penggunaan beragam sumber data dalam suatu penelitian. Selain itu, peneliti juga menerapkan triangulasi peneliti dengan menggandeng beberapa peneliti yang memiliki latar belakang disiplin ilmu yang berbeda. Keabsahan data atau triangulasi peneliti dalam konteks ini diperkuat oleh independensi peneliti sebagai instrumen utama, di samping sifat teori yang tidak memihak. Kombinasi kedua aspek triangulasi ini diharapkan dapat

²⁰ Ibid, Hlm., 401

²¹ Pahrudin, Makmum Wahid, Rio Yusri Maulana, Sustris Desti Elsi, Moh, Arif Rakhman., Op.Cit., 2017, Hlm. 17-18

memberikan keabsahan yang lebih kuat terhadap temuan penelitian. Triangulasi sumber data pada penelitian ini yang pertama data dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, data itu selanjutnya akan di cek keabsahannya kepada pengunjung.